

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Indonesia digambarkan sebagai negara kepulauan yang mempunyai ciri keragaman budaya. Sebagai negara dengan lebih dari 17.000 pulau, Indonesia dihuni oleh ratusan suku bangsa yang memiliki tradisi, bahasa, adat istiadat, dan kebudayaan yang unik. Keberagaman ini tercermin dalam berbagai aspek kehidupan, seperti seni tari, musik, pakaian adat, upacara adat, hingga kuliner yang khas di setiap daerah.¹ Misalnya, suku Jawa, Batak, Bali, Minangkabau, Bugis, Dayak, dan banyak lagi memiliki bahasa daerah dan kesenian yang khas. Selain itu, agama dan keyakinan yang dianut juga beragam, mulai dari Islam, Kristen, Hindu, Buddha, hingga kepercayaan lokal. Meskipun beragam, Indonesia memiliki semboyan nasional “Bhinneka Tunggal Ika” yang berarti "berbeda-beda tetapi tetap satu" Semboyan ini menegaskan semangat persatuan di tengah keberagaman yang ada di negara ini.

Di Indonesia, toleransi adalah nilai dasar yang mendukung persatuan dalam keragaman. Sikap toleransi diartikan sebagai penghormatan dan penerimaan terhadap perbedaan baik itu perbedaan agama, suku, budaya, maupun pandangan. Dengan sikap toleransi, masyarakat Indonesia mampu hidup berdampingan meski berbeda, menjaga harmoni, dan mencegah konflik. Nilai ini juga selaras dengan

¹ Rahardjo, Turnomo. 2005. *Menghargai Perbedaan Kultural Mindfulness dalam Komunikasi Antaretnis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset. Hal. 63

semboyan "Bhinneka Tunggal Ika" yang menekankan bahwa meski beragama, Indonesia tetap satu. Toleransi menjadi landasan bagi persatuan dan kesatuan bangsa, memastikan semua warga merasa dihargai, diakui, dan hidup bersama dalam kerukunan. Menurut Winiarska dan Klaus, toleransi adalah sikap menghargai perbedaan pendapat, perilaku, gaya hidup seseorang.² Maka dari itu bisa dipahami dan simpulkan bahwa toleransi adalah sikap menghormati dan menerima perbedaan, baik dalam pandangan, tingkah laku, budaya, agama, maupun gaya hidup orang lain. Dengan sikap ini, kita bisa hidup bersama secara harmonis meskipun memiliki latar belakang atau pemikiran yang beragam. Toleransi juga menciptakan lingkungan yang inklusif, di mana setiap individu merasa dihargai dan bebas menjadi dirinya sendiri tanpa rasa takut akan diskriminasi atau penilaian negatif.

Hidup rukun dalam keragaman suku, ras, etnis, dan agama di Indonesia membutuhkan kesadaran dan penghargaan terhadap nilai-nilai multikulturalisme. Nilai-nilai ini mendorong masyarakat untuk saling menerima dan menghormati perbedaan, mengedepankan toleransi, serta mempererat persatuan. Dalam hal ini, multikulturalisme menjadi fondasi untuk menjaga kesatuan bangsa, mengurangi potensi konflik, dan memperkuat semangat kebangsaan. Dengan menerapkan nilai-nilai ini, masyarakat Indonesia dapat membangun lingkungan yang harmonis, saling menghargai, dan mengembangkan kehidupan bersama yang inklusif.³

² Szejnberg, A., Jasiński, T. L. 2014. Measurement of the tolerance general level in the higher education students. *International Journal of Latest Research in Humanities and Social Science (IJLRHSS)*, Vol. 1 No. 4, Hal. 01-07.

³ Fathudin, Syukri. Fitria, Vita. 2012. Internalisasi Nilai Multikulturalisme dan Kerukunan Antarumat Beragama dalam Masyarakat. *Jurnal Penelitian Humainora*, 17(2).

Penting supaya bisa mengembangkan kesadaran diri dari kelompok-kelompok masyarakat, meningkatkan kepekaan budaya masyarakat, memperkuat kompetensi interkultural budaya-budaya pada masyarakat dan menghilangkan sikap rasisme dan berbagai prasangka.

Multikulturalisme mencerminkan kehidupan masyarakat yang terdiri dari beragam latar belakang budaya, ras, agama, dan kelompok. Dalam masyarakat yang beragam ini, terciptanya keharmonisan sangat bergantung pada kesadaran bersama akan pentingnya sikap toleransi, penerimaan, dan penghargaan terhadap perbedaan. Dengan sikap toleran dan terbuka, lingkungan yang damai bisa terbentuk, meskipun setiap individu atau kelompok tetap memiliki identitas unik masing-masing. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya hidup berdampingan secara fisik tetapi juga mampu menjalin hubungan saling mendukung tanpa harus kehilangan keunikan identitasnya. Penting untuk membangun kesadaran multikulturalisme guna mencegah konflik dan membangun solidaritas yang kokoh di tengah keberagaman.⁴

Provinsi Sumatera Barat belakangan ini sering menjadi perhatian publik terkait isu keberagaman, demokrasi, dan toleransi. Perhatian ini timbul karena sejumlah peristiwa dan kebijakan yang memicu diskusi di tingkat nasional, khususnya terkait penerapan nilai-nilai lokal yang dianggap kurang menerima perbedaan agama dan etnis. Namun, penting untuk diingat bahwa Sumatera Barat memiliki sejarah yang panjang dalam hal budaya gotong-royong serta nilai adat

⁴ Rustanto, B. 2015. *Masyarakat Multikultural Indonesia*. Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya.

Minangkabau yang mengedepankan musyawarah dan mufakat. Prinsip "adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah" yang memadukan adat dan agama menjadi landasan bagi kehidupan masyarakat. Tantangan yang dihadapi Sumatera Barat dalam keberagaman dan toleransi sebagian besar berasal dari upaya menyesuaikan nilai lokal dengan prinsip nasional yang semakin terbuka dan inklusif. Baik pemerintah daerah maupun masyarakat terus berupaya mencari keseimbangan untuk menjaga keharmonisan, sambil tetap mempertahankan kearifan lokal dan menerima keberagaman. Dengan pemahaman dan dialog yang lebih baik, diharapkan Sumatera Barat dapat menunjukkan keberhasilan dalam menjaga kerukunan di tengah perbedaan yang unik. Beberapa survei nasional maupun lembaga riset, salah satunya ialah Indeks Demokrasi Indonesia. BPS (Badan Pusat Statistik) Indonesia merilis Provinsi Sumatera Barat masuk kedalam daftar lima besar indeks demokrasi terburuk sejak tahun 2009 hingga tahun 2018 (BPS 2018).⁵ Kajian minoritas menjadi menarik ketika membahas Sumatera Barat.

Pada Indeks Kota Toleran yang dirilis SETARA institute, Kota Padang, Sumatera Barat, (dengan skor 4,060) menempati peringkat tiga sebagai kota intoleran setelah Kota Depok (dengan skor 3,610) dan Cilegon, (skor 3,227). Kota Cilegon skor paling rendah toleransinya di Indonesia. Hal ini bermakna, masyarakat di Cilegon mendapatkan indeks kerukunan keberagaman paling rendah se Indonesia. Dalam studi ini, SETARA menetapkan 4 variabel dengan 8 indikator sebagai alat ukur. Hasil penelitian dari setara institute pada tahun 2022 tentang

⁵ Badan Pusat Statistik 2018, *Indeks Demokrasi Indonesia*, Sumatra Barat 2018.

indeks kota toleran, terdapat 10 kota yang dianggap memiliki toleransi rendah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.⁶

Tabel 1.1
10 Kota skor terendah IKT 2022

Rangking	Kota	Skor akhir
85	Prabumulih	4,510
86	Lhokseumawe	4,493
87	Pariaman	4,450
88	Medan	4,420
89	Banda Aceh	4,393
90	Mataram	4,387
91	Sabang	4,257
92	Padang	4,060
93	Depok	3,610
94	Cilegon	3,227

Sumber : Setara Institute 2023

Pengelolaan keberagaman umat beragama di tingkat daerah di Indonesia diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tahun 2006, Nomor 8 dan Nomor 9. Peraturan ini tentang pedoman kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk menjaga kerukunan antarumat beragama. Beberapa poin utama dalam peraturan tersebut mencakup, pendidikan toleransi yang dapat mendorong adanya pendidikan yang menanamkan nilai-nilai toleransi dan penghormatan antarumat beragama. Dialog dan komunikasi, memfasilitasi dialog antarumat beragama untuk memperkuat hubungan dan memahami perbedaan. Pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan masyarakat dalam kegiatan yang dapat meningkatkan kerukunan, seperti perayaan bersama dan kegiatan sosial. Penanganan konflik dengan menyusun mekanisme untuk menangani konflik yang

⁶ SETARA institute for Democracy and Peace. 2023, *Indeks Kota Toleran di Indonesia 2022*. Jakarta. www.setara-institute.org

mungkin timbul serta menjaga agar ketegangan antarumat beragama dapat dihindari. Regulasi ini bertujuan untuk menciptakan suasana yang harmonis dan damai serta memperkuat persatuan di tengah keberagaman yang ada.

Di Indonesia, tata kelola pemerintahan tak bisa dilepaskan dari mekanisme desentralisasi-sentralisasi. Desentralisasi sebagai sebuah mekanisme pembagian kewenangan yang inklusif mengharuskan adanya kekuasaan yang beragam, yang antara lain terdiri perbedaan etnis, agama atau budaya, gender dan disparitas dalam pemberian sumber daya. Untuk itu, melaksanakan tata kelola inklusif dalam kerangka desentralisasi-sentralisasi dapat dimulai dengan habituasi tata kelola inklusif pada aparatur dan masyarakat di daerah. Idealnya dimulai di tingkat Kabupaten/Kota sampai dengan Provinsi.⁷

Secara konseptual, masyarakat majemuk dapat dibagi menjadi beberapa kategori berdasarkan dinamika dan interaksi antar kelompok dalam masyarakat tersebut. Berikut adalah penjelasan mengenai empat kategori masyarakat majemuk, dimulai dengan yang pertama, masyarakat majemuk dengan kompetisi seimbang: pada kategori ini, kelompok etnis, agama, atau budaya dalam masyarakat memiliki kekuatan dan pengaruh yang setara. Kedua, masyarakat majemuk dengan mayoritas dominan, dalam kategori ini, satu kelompok tertentu memiliki kekuatan dan pengaruh yang jauh lebih besar dibandingkan kelompok lainnya.. Ketiga, masyarakat majemuk dengan minoritas dominan, yaitu dimana dalam masyarakat terdapat sekelompok minoritas, akan tetapi memiliki keunggulan kompetitif yang

⁷ Hasani, Ismail, and Iif Fikriyati Ihsani. *"Modul Pelatihan Tata kelola Pemerintahan Inklusif."*, Jakarta, Pustaka Masyarakat Setara, 2021, hlm 28-29

luas sehingga kekuatan kompetitifnya mendominasi bidang-bidang kehidupan tertentu seperti politik dan ekonomi. Keempat, masyarakat majemuk dengan fragmentasi, yaitu masyarakat terdiri dari berbagai kelompok yang sangat terpisah satu sama lain, baik secara budaya maupun sosial.⁸

Kota Padang, sebagai bagian dari masyarakat majemuk dengan kelompok mayoritas dominan, menunjukkan pola struktur sosial yang khas. Struktur ini memungkinkan munculnya kelompok-kelompok sosial yang dibentuk berdasarkan kesamaan identitas, seperti suku, agama, ras, atau aliran tertentu. Proses ini disebut konsolidasi, yaitu proses penguatan ikatan individu terhadap kelompok sosial yang dirasakannya sebagai bagian dari identitas atau solidaritas kolektif. Dalam masyarakat dengan struktur sosial seperti ini, konsolidasi sering kali bertujuan untuk memperkuat posisi dan identitas kelompok dalam konteks sosial yang lebih luas. Kelompok-kelompok tersebut juga sering kali berfungsi untuk melindungi, mendukung, atau memperjuangkan kepentingan bersama yang mungkin berbeda dari kelompok lainnya. Namun, fenomena ini juga bisa memiliki potensi ketegangan jika hubungan antarkelompok tidak dikelola dengan baik, karena perbedaan latar belakang dan kepentingan yang ada. Konsolidasi pada masyarakat majemuk yang berstruktur seperti ini dapat mengarah pada solidaritas yang kuat dalam kelompok, tapi juga menuntut upaya rekonsiliasi, komunikasi, dan kerja sama lintas kelompok untuk menciptakan harmoni dalam kehidupan sosial di Kota Padang. Menarik dikaji di Kota Padang, bagaimana praktik-praktik toleransinya.

⁸ Setiadi, Ely M. dan Usman Kolip. 2011. *Pengantar sosiologi: Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial, Teori, Aplikasi dan Pemecahannya*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group.

Ditinjau pada penelitian-penelitian sebelumnya dan setelah melakukan literature review terhadap jurnal-jurnal penelitian yang sama dengan tema yang diteliti, memiliki kesamaan dalam konsep peran atau upaya pemerintah. Yaitu dari penelitian yang dilakukan Masrul, Ubaidullah dan Aminah pada tahun 2020 dengan judul “Peran Pemerintah Kota Banda Aceh dalam Menghadapi Isu Intoleransi Antar Umat Beragama”.⁹ Adapun upaya pemerintah Kota Banda Aceh dalam mengatasi isu intoleransi adalah dengan membentuk dan memfasilitasi wadah komutasi antar umat beragama yang ada di Kota Banda Aceh.

Penelitian tentang peran pemerintah yang dilakukan oleh Gabrielia Stefra Sanchia Mewengkang, Ismail Sumampow dan Donal K. Monintja pada tahun 2023 berjudul “Peran Pemerintah dalam Memelihara Toleransi Umat Beragama di Kecamatan Langowan Timur”¹⁰ Salah satu peran pemerintah adalah sebagai fasilitator dialog antarumat beragama. Pemerintah setempat dapat mengadakan pertemuan atau dialog antara tokoh-tokoh agama atau pemuka agama dari berbagai agama yang ada di wilayah tersebut.

Selanjutnya penelitian Thomas Aktawalora yang berjudul “Peran Pemerintah Daerah dalam Menjaga Kerukunan Umat Beragama di Kota Ambon Provinsi Maluku”¹¹ Peran pemerintah dan FKUB Kota Ambon telah berperan dengan baik bila ditinjau dengan teori peran dari soekanto ialah indikator hak dan

⁹ Masrul, Ubaidullah, Aminah. “Peran Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Menghadapi Isu Intoleransi Antar Umat Beragama”, JPS : Journal of Political Sphere, (2020).

¹⁰ Mewengkang, G. S. S., Sumampow, I., & Monintja, D. K. “Peran Pemerintah Dalam Memelihara Toleransi Umat Beragama Di Kecamatan Langowan Timur”, Vol.3(2), Jurnal Eksekutif, 2023.

¹¹ Aktawalora, Thomas, Tesis: “Peran Pemerintah Daerah Dalam Menjaga Kerukunan Umat Beragama di Kota Ambon Provinsi Maluku”. Maluku, Institute Pemerintahan Dalam Negeri, (2022).

kewajiban. Ini terlihat dalam pelaksanaan pemerintah daerah dan FKUB dalam menjaga kerukunan umat beragama yaitu dengan upaya sosialisasi, pemahaman dan kegiatan lintas agama pada masyarakat agar dapat memahami dan dapat menjalankannya.

Penelitian Ahmad Fajarudin pada tahun (2018) yang berjudul “Upaya Pemerintah Kota Tangerang dalam Menjaga dan Memelihara Kerukunan Antar Umat Beragama”¹² penelitian ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama di Kota Tangerang adalah memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama, menumbuhkan keharmonisan, membina dan mengkoordinasikan lurah/kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan keagamaan. Dan penelitian Darwis Muhdina (2018) yang berjudul “Peran Pemerintah terhadap kerukunan Umat Beragama di Kota Makassar”¹³ dalam penelitian ini bahwa perhatian pemerintah terhadap pembinaan kerukunan umat beragama cukup baik, hal itu dibuktikan dengan bantuan-bantuan yang diberikan kepada umat beragama dan lembaga keagamaan.

Dan penelitian yang juga berangkat dari hasil penelitian SETARA institute dan juga salah satu Kota di Provinsi Sumatera Barat yaitu, Abigel Ferti Yovi berjudul “Praktik Toleransi antar Umat Beragama di Kota Padang Panjang tahun

¹² Fajaruddin, A, Skripsi: “Upaya pemerintah kota tangerang dalam menjaga dan memelihara kerukunan antar umat beragama”. Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, (2018).

¹³ Muhdina, D. “Peran Pemerintah Terhadap Kerukunan Umat Beragama di Kota Makassar”, Vol.21(2), Jurnal Ushuluddin, (2018).

2021”.¹⁴ Hasil dari temuan peneliti menunjukkan bahwa Kota Padang Panjang dalam praktik toleransi antar umat beragama cenderung memiliki citra positif. Hal ini dibuktikan dengan toleransi yang masih terjaga di lingkungan masyarakat.

Setelah melakukan *literature review* pada beberapa penelitian terdahulu diatas, penelitian tersebut yang dimana melihat peranan maupun upaya dari pemerintah daerah tersebut dalam menjaga kerukunan keberagaman di daerahnya. Sejalan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan di Kota Padang, penentuan fokus penelitian lebih diarahkan pada kebaruan informasi yang akan diperoleh dari Bagaimana Praktik toleransi di Kota Padang dalam menghadapi isu intoleransi dengan menggunakan teori-teori pada penelitian ini, sekaligus menjelaskan dan menganalisis penyebab rendahnya skor toleransi Kota Padang pada penelitian setara institute.

1.2 Rumusan masalah

Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan Nomor 9 Tahun 2006 ini berfungsi sebagai panduan bagi kepala daerah/wakil kepala daerah dalam menjaga keharmonisan antar umat beragama di Indonesia. Dalam aturan ini, kerukunan umat beragama didefinisikan sebagai perpaduan antara toleransi, kesetaraan, dan kolaborasi antara berbagai kelompok agama dan pemerintah, terutama dalam aspek pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan hubungan yang harmonis antar umat

¹⁴ Abigel Ferti Yovi. Skripsi: ” Peran Pemerintah Kota Padang Panjang Dalam Menghadapi Isu Intoleransi Tahun 2021 ”, Universitas Andalas, (2023).

beragama, mendukung upaya penyelesaian konflik keagamaan secara sinergis, dan memastikan setiap kelompok agama memiliki kesempatan yang setara dalam menjalankan ibadahnya, sambil tetap menghormati perbedaan yang ada. Aturan ini juga mengatur pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang bertugas memfasilitasi dialog antarumat, menyalurkan aspirasi umat beragama, dan memberikan rekomendasi terkait pendirian rumah ibadat demi menjaga hubungan harmonis di tengah masyarakat.

Pada konteks keberagaman di Indonesia, tidak terlepas dari adanya pengaruh heterogenitas penduduk Indonesia yang sangat beragam. Dengan kemajemukan Indonesia lahir karena adanya mimpi bersama, bukan untuk kepentingan satu atau beberapa golongan.¹⁵ Pada aspek keberagaman keagamaan hanya enam agama resmi yaitu Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Budha dan Konghucu. Berkaitan dengan keberagaman agama Kota Padang termasuk daerah yang heterogen dari segi agama, meskipun mayoritas penduduknya beragama Islam. Berikut data jumlah penduduk berdasarkan agama dan keyakinan:

Tabel 1.2

Jumlah penduduk berdasarkan agama yang dianut di Kota Padang

Penganut Agama	Jumlah
Islam	890.969
Protestan	6.549
Katolik	12.529
Hindu	1.085
Budha	2.567
Lainnya	0
Jumlah	931.699

Sumber : BPS Kota Padang tahun 2021

¹⁵ Kewuel, H. K. (2017). Pluralisme, Multikulturalisme, dan Batas-batas Toleransi. Malang: Program Studi Antropologi, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Brawijaya. Hlm 5

Tabel tersebut menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Kota Padang beragama Islam, tetapi ada keberagaman agama yang tumbuh dan hidup berdampingan di sana. Hal ini mengindikasikan bahwa Kota Padang adalah kota dengan pluralitas yang signifikan, baik dari segi agama maupun suku. Keberagaman ini menunjukkan bahwa Kota Padang memiliki toleransi yang baik dan ruang bagi berbagai kelompok agama dan etnis untuk hidup bersama secara harmonis.

Kota Padang memang dikenal sebagai kota dengan penduduk Minangkabau yang kental dengan nuansa adat dan agama. Prinsip Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) mencerminkan filosofi hidup masyarakat Minangkabau, di mana adat atau budaya diselaraskan dengan ajaran agama Islam. Ini tercermin dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, seperti cara berpakaian, upacara adat, serta tata krama dan nilai-nilai sosial. Keberagaman etnis di Kota Padang, seperti Jawa, Tionghoa, Nias, Mentawai, Batak, Aceh, dan Tamil, menambah kekayaan budaya di kota ini. Walaupun sebagian besar masyarakatnya adalah suku Minangkabau yang menganut Islam, keberadaan etnis-etnis lain ini turut membentuk dinamika sosial dan budaya yang khas.¹⁶

Praktik toleransi yang menjunjung tinggi keberagaman budaya tampak dalam berbagai festival di Kota Padang, menunjukkan kerukunan di antara masyarakat yang beragam etnis dan agama. Contohnya, Padang Multikultural Festival pada Februari 2019 merayakan kekayaan budaya yang berbeda-beda.

¹⁶ Ar Rafi Saputra Irwan, "Kota Padang Dalam Bingkai Keberagaman" *Duta Damai* (Padang 2021), <https://dutadamaisumaterabarat.id/kota-padang-dalam-bingkai-keberagaman/>

Selain itu, festival Bakcang Ayam dan Lamang Baluo yang diadakan di Kota Tua Padang pada 6-7 Juni 2019 menggambarkan proses asimilasi dan akulturasi antara etnis Tionghoa dan Minangkabau, menjadi bukti keharmonisan dalam keberagaman. Di bulan Januari 2020, perayaan Imlek, yang merupakan tahun baru Tionghoa, dilangsungkan bersamaan dengan Tradisi Serak Gulo yang merupakan kebudayaan dari etnis Keeling (India Muslim) di Padang. Momen ini menunjukkan bahwa masyarakat dengan latar belakang budaya dan agama berbeda dapat hidup rukun dan saling menghormati dalam kebersamaan budaya.¹⁷ Pernyataan ini menggarisbawahi bahwa Kota Padang merupakan contoh hidup dari keberagaman etnis yang hidup dalam harmoni. Padang dikenal sebagai kota multikultural di mana beragam suku dan etnis, seperti Minangkabau, Tionghoa, Batak, dan etnis lainnya, berbaur dan berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Meski sesekali terjadi gesekan atau konflik, sering kali hal tersebut disebabkan oleh tindakan oknum atau kesalahpahaman, bukan karena perselisihan antar-etnis yang mendasar. Kesadaran masyarakat akan pentingnya toleransi dan saling menghargai menjadi fondasi kuat dalam menjaga keharmonisan di Kota Padang.

¹⁷ *Ibid.*

Gambar 1.1
Tradisi Serak gulo dan Perayaan Imlek



Sumber: Duta Damai Sumatera Barat

Setara Institute memang rutin mengeluarkan Indeks Kota Toleran (IKT) yang menilai tingkat toleransi di berbagai kota di Indonesia berdasarkan sejumlah indikator. Dalam laporan ini, toleransi diukur melalui praktik kerukunan antar umat beragama, kebijakan pemerintah daerah, serta respons terhadap keberagaman dan kelompok minoritas. Kota Padang sering kali mendapat perhatian khusus karena dalam beberapa survei, kota ini tercatat memiliki skor rendah dalam aspek toleransi. Hal ini mungkin disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kebijakan daerah atau kejadian yang menunjukkan adanya tantangan dalam kerukunan beragama dan penerimaan terhadap keberagaman. Meskipun ini menciptakan citra negatif, upaya meningkatkan toleransi masih dapat dilakukan melalui dialog antaragama, pendidikan toleransi, serta penguatan kebijakan inklusif oleh pemerintah daerah. Inisiatif-inisiatif ini dapat membantu meningkatkan citra kota dalam indeks tersebut dan menciptakan lingkungan yang lebih harmonis. Hal ini dilihat dari penelitian yang dilakukan oleh Setara Institute dalam Indeks Kota Toleran 2022, dari hasil

penelitian tersebut Kota Padang berada pada urutan 3 terendah dari seluruh kota di Indonesia. Berikut rangkumannya :

Tabel 1.3

Rekapitulasi 10 Kota Terendah (2020-2022)

No	IKT 2020 Kota	Skor	No	IKT 2021 Kota	Skor	No	IKT 2022 Kota	Skor
85	Pekanbaru	3,85	85	Makassar	4,52	85	Prabumulih	4,51
86	Langsa	3,81	86	Pekanbaru	4,50	86	Lhokseumawe	4,49
87	Cilegon	3,73	87	Padang	4,46	87	Pariaman	4,45
88	Sabang	3,72	88	Padang Panjang	4,44	88	Medan	4,42
89	Medan	3,67	89	Sabang	4,37	89	Banda aceh	4,39
90	Pangkal pinang	3,63	90	Langsa	4,36	90	Mataram	4,38
91	Makassar	3,57	91	Pariaman	4,23	91	Sabang	4,25
92	Depok	3,35	92	Cilegon	4,09	92	Padang	4,06
93	Padang	3,18	93	Banda aceh	4,04	93	Depok	3,61
94	Banda aceh	2,84	94	Depok	3,58	94	Cilegon	3,22

Sumber ; Setara institute

Pada tahun 2020, Setara institute mengeluarkan rilis dimana kota Padang berada di urutan kedua untuk kota intoleran dengan (**skor 3,18**), selanjutnya pada tahun 2021, Setara kembali mengeluarkan hasil survei dimana terdapat peningkatan Kota Padang yang pada nomor kedelapan kota intoleran dengan (**skor 4,46**), dan pada rilis hasil survei Setara institute tahun 2022 Kota Padang berada pada urutan ketiga dengan (**skor 4,06**).

Dari data yang diambil oleh Setara Institute pada tahun 2022 penelitian Setara Institute menempatkan Kota Padang pada urutan 92 dengan (**skor 4,06**), Mengacu pada definisi operasional dan berdasarkan pada kerangka indexing, studi IKT menetapkan 4 (empat) variabel dengan 8 (delapan) indikator sebagai alat ukur, yaitu:

- A. Regulasi Pemerintah Kota. Indikator 1: Rencana pembangunan dalam bentuk RPJMD dan produk hukum pendukung lainnya. Indikator 2: Ada tidaknya kebijakan diskriminatif.
- B. Regulasi Sosial. Indikator 3: Peristiwa intoleransi. Indikator 4: Dinamika masyarakat sipil terkait isu toleransi.
- C. Tindakan Pemerintah. Indikator 5: Pernyataan pejabat kunci tentang isu toleransi. Indikator 6: Tindakan nyata terkait isu toleransi.
- D. Demografi Sosio-Keagamaan. Indikator 7: Heterogenitas keagamaan penduduk. Indikator 8: Inklusi sosial keagamaan.¹⁸

Hasil pengukurannya dapat kita lihat pada tabel berikut:

Tabel 1.4

Rangking	Kota	Ind 1	Ind 2	Ind 3	Ind 4	Ind 5	Ind 6	Ind 7	Ind 8	Skor akhir
85	Prabumulih	2,00	6,55	6,50	4,00	4,00	3,00	3,00	3,00	4,510
86	Lhokseumawe	2,83	5,55	6,50	4,00	4,00	4,00	2,00	3,00	4,493
87	Pariaman	2,00	7,00	7,00	3,00	3,00	3,00	2,00	3,00	4,450
88	Medan	3,50	6,85	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	3,00	4,420
89	Banda aceh	2,83	5,80	6,50	2,00	3,00	5,00	2,00	3,00	4,393
90	Mataram	3,67	5,85	6,00	3,00	3,00	4,00	3,00	3,00	4,387
91	Sabang	3,67	6,70	7,00	3,00	2,00	2,00	3,00	2,00	4,257
92	Padang	3,50	5,05	6,00	4,00	2,00	3,00	3,00	3,00	4,060
93	Depok	3,50	4,55	4,00	4,00	3,00	3,00	4,00	2,00	3,610
94	Cilegon	2,67	5,30	4,00	2,00	3,00	2,00	2,00	2,00	3,227

Sumber : Setara Institute 2023

Wali Kota Padang Hendri Septa mengaku tidak habis pikir, Kota Padang dikatakan masuk daftar daerah paling tidak toleran (intoleran) di Indonesia. Seperti pernyataan beliau yang dikutip pada RRI Padang sebagai berikut.

“Saya juga tidak paham indikator apa yang mereka gunakan sehingga bisa memasukan kota Padang sebagai kota intoleran di Indonesia,”katanya kepada RRI Padang, Senin (24/4/2023).

¹⁸ SETARA institute for Democracy and Peace. 2023, *Indeks Kota Toleran di Indonesia 2022*. Jakarta. www.setara-institute.org

Hendri Septa menilai, Kota Padang merupakan daerah yang penuh dengan toleransi. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya rumah ibadah dari berbagai agama. Selain itu Pemerintah Kota Padang juga mengadakan berbagai kegiatan multi etnis seperti Tionghoa dan India.¹⁹

Respon dari pemerintah Kota Padang tentu diperlukan, melihat hasil dari penelitian Setara Institute pada Indeks Kota Toleran (IKT) tahun 2022 memberikan skor (**skor 2,00**) pada indikator 5 yaitu pernyataan pejabat kunci tentang isu toleransi pada variabel Tindakan Pemerintah, angka 2,00 menunjukkan skor yang rendah pada penelitian Setara Institute.

Dalam ringkasan eksekutif Indeks Kota Toleran (IKT) yang diterbitkan oleh SETARA, diakui bahwa memang ada tantangan untuk menghindari bias subjektivitas dalam pemberian skor pada indikator yang digunakan dalam penilaian. Untuk meminimalkan bias tersebut, SETARA menggunakan dua teknik penelitian. Pertama, mereka melakukan triangulasi dengan melibatkan narasumber kunci untuk memvalidasi data dan informasi yang diperoleh. Kedua, mereka mengadakan konfirmasi dan self-assessment pada pemerintah kota yang termasuk dalam daftar 10 kota dengan skor tertinggi dan 10 kota dengan skor terendah dalam indeks tersebut. Langkah ini diambil untuk memastikan penilaian yang lebih akurat dan objektif terhadap indikator toleransi kota..²⁰

¹⁹ Melati Oktawina, Wako Padang Tidak Habis Pikir, Padang Dikatakan Intoleran, *RRI Padang* (2023), https://www.rri.co.id/padang/daerah/220138/wako-padang-tidak-habis-pikir-padang-dikatakanintoleran?utm_source=news_slide&utm_medium=internal_link&utm_campaign=Genera1%20Campaign

²⁰ L. Adhi Bhaskara, *tirto.id* (2018) "Di Balik Kontroversi Indeks Kota Toleran dari SETARA Institute", <https://tirto.id/dbvg>

Doktor Ilmu Politik dari University of Notre Dame, Nathanael Gratiyas Sumaktoyo, mengatakan, dari segi metodologi, studi yang dilakukan SETARA sudah lebih baik dari studi-studi serupa yang telah mereka lakukan pada tahun-tahun sebelumnya. Nathanael menyatakan

“Bahwa dalam melihat suatu studi, memang diperlukan sikap kritis ketika membaca atau memahami studi tersebut. Terkait protes dari sejumlah pihak terhadap IKT, ia menyarankan agar masyarakat dan pejabat pemerintah tidak melihat laporan seperti IKT sebagai kebenaran mutlak, tapi juga jangan bersikap defensif. Studi tersebut dapat menjadi masukan yang berarti”.²¹

Dari respon oleh pemerintah Kota Padang atas hasil dari penelitian setara institute tahun 2022, peneliti berasumsi bahwa nyatanya Kota Padang sudah melakukan praktik-praktik toleransi terlihat dari kehidupan multikultural di Kota Padang dan juga pernyataan dari Wali Kota Padang. Berangkat dari permasalahan diatas rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Praktik-praktik toleransi di Kota Padang tahun 2022-2023?

1.3 Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis praktik-praktik toleransi yang terjadi di Kota Padang pada tahun 2022-2023.

²¹ *Ibid*

1.4 Manfaat penelitian

Hasil pada penelitian ini diharapkan memberi manfaat sebagai berikut :

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran dan perkembangan pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu politik terutama mengenai faktor yang mempengaruhi tingkat intoleran suatu daerah.
2. Secara praktis, penelitian ini memberikan deskripsi suatu model pemahaman yang membahas mengenai toleransi maupun kerukunan antar umat beragama guna menghindari terjadinya konflik sosial di Indonesia.

